

SKRIPSI

**PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF
PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI
JAKARTA BARAT**



DIAJUKAN OLEH:
NAMA: ANASTASYA VALLEN LANGI
NIM: 125160365

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2020

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANASTASYA VALLEN LANGI
NIM : 125160365
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PPN, PPhBM, DAN PKB TARIF
PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT DI JAKARTA BARAT

Jakarta, 12 Januari 2020

Pembimbing Pendamping,



(Henny, S.E., M.Si., Ak., BKP, CA)

Pembimbing,



(Widyasari, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA)



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : ANASTASYA VALLEN LANGI
N I M : 125160365
PROGRAM STUDI : S.1 AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PPN, PPNBM DAN PKB TARIF PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI JAKARTA BARAT

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas :

1. Ketua : LIANA SUSANTO
2. Anggota : WIDYASARI
: YANTI

Jakarta, 29 Januari 2020

Pembimbing

WIDYASARI

Pembimbing Pendamping

HENNY

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

ABSTRAK

PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI JAKARTA BARAT

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tarif Progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan 150 sampel konsumen kendaraan bermotor roda empat yang berdomisili di Jakarta Barat yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data bersumber dari data primer yang berupa kuesioner dan diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN dan PPnBM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap daya beli, sementara PKB Tarif Progresif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap daya beli.

Kata Kunci: PPN, PPnBM, PKB, Daya Beli

The purpose of this study is to examine empirically about the effect of Value Added Tax (VAT), Sales Tax on Luxury Goods, and Motor Vehicle Tax on customer purchasing power of four-wheeled motor vehicles in West Jakarta. This study uses 150 samples of four-wheeled motorized vehicle consumers domiciled in West Jakarta obtained by nonprobability sampling method with purposive sampling technique. Data sourced from primary data in the form of a questionnaire and processed using multiple regression analysis techniques with the SPSS 23 version program. The results of the study show that VAT and Sales Tax on Luxury Goods have a significant positive influence on purchasing power, while Motor Vehicle Tax has a significant negative influence on purchasing power.

Key words: VAT, Sales Tax on Luxury Goods, Motor Vehicle Tax, Purchasing Power

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, karunia, dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Jakarta Barat”**, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari skripsi ini dapat berhasil berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., MM., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Akt., CPMA, CA, CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Widyasari, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA dan Ibu Henny, S.E., M.Si., Ak., BKP, CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan saran dalam memberikan arahan serta bimbingan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama kuliah.
6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan demi kelancaran skripsi ini, terutama kepada Papa, Mama, dan Glady.
7. Sahabat-sahabat pejuang skripsi Celine Meidita, dan Stefani yang selalu menjadi *“support system”* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta selalu menemani lika-liku kehidupan perkuliahan sejak semester satu,

termasuk Livia Soekianto, Angelina Jessica, Jessica Gunawan, dan Stefanny Xie yang selalu ada, memberi dukungan dan motivasi.

8. Sahabat sekaligus saudara, Angel yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan semangat sejak awal perkuliahan, yang selalu menemani dalam suka dan duka.
9. Keluarga besar BEM FE periode 2016/2017, 2017/2018. dan 2018/2019 yang senantiasa menyemangati, dan membuat kehidupan selama masa perkuliahan lebih berwarna.
10. Sahabat-sahabat masa SMA yang sampai saat ini selalu ada memberi dukungan baik dalam doa dan dalam kata-kata penyemangat, yaitu: Lobo, Niki, Eyen, Uwa, Mega, Milly, Lovelly, dan Celine.
11. EXO dan X1 yang sudah menemani penulis lewat musiknya, sekaligus memberikan semangat lewat setiap canda tawa, dan setiap momen bahagia yang berharga.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 12 Januari 2020

Penulis,



(Anastasya Vallen Langi)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah.....	7
B. TUJUAN DAN MANFAAT.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Manfaat.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	9
1. Teori Daya Beli.....	9
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL.....	10
1. Pajak.....	10
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).....	12
4. Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif.....	17
5. Daya Beli.....	19
C. KAITAN ANTARA VARIABEL-VARIABEL.....	20
1. Teori.....	20
2. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	23
D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. DESAIN PENELITIAN	28
B. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL, DAN UKURAN SAMPEL	29
C. OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INSTRUMEN	29
D. ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS	32
1. Uji Validitas	32
2. Uji Reliabilitas	33
E. ANALISIS DATA.....	33
1. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	34
2. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F).....	35
3. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t).....	35
F. ASUMSI ANALISIS DATA.....	36
1. Uji Normalitas.....	36
2. Uji Heteroskedastisitas.....	36
3. Uji Multikolinieritas.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN	38
B. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	42
C. HASIL Uji ASUMSI ANALISIS DATA	45
1. Uji Validitas	46
2. Uji Reliabilitas	52
3. Uji Normalitas.....	54
4. Uji Heteroskedastisitas.....	55
5. Uji Multikolinieritas.....	55
D. HASIL ANALISIS DATA	57
1. Uji Koefisien Determinasi	57
2. Uji F	58
3. Uji t	59
E. PEMBAHASAN	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN	66
B. KETERBATASAN DAN SARAN.....	67
1. Keterbatasan.....	67

2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tarif PPnBM atas Kendaraan Bermotor 13
Tabel 2.2	Tarif PKB dengan Kepemilikan Orang Pribadi 19
Tabel 2.3	Penelitian yang Relevan 23
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian 31
Tabel 4.1	Karakteristik Responden..... 38
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Obyek Penelitian (PPN) 42
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Obyek Penelitian (PPnBM) 43
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Obyek Penelitian (PKB)..... 44
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Obyek Penelitian (Daya Beli) 45
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas PPN (20 sampel) 46
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas PPN (150 sampel) 47
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas PPnBM (20 sampel) 48
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas PPnBM (150 sampel) 49
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas PKB (20 sampel) 49
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas PKB (150 sampel)..... 50
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Daya Beli (20 sampel)..... 51
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Daya Beli (150 sampel)..... 51
Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas..... 52
Tabel 4.15	Hasil Uji Normalitas 54
Tabel 4.16	Hasil Uji Heteroskedastisitas 55

Tabel 4.17	Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
Tabel 4.19	Hasil Uji F (<i>Test of ANOVA</i>).....	58
Tabel 4.20	Hasil Uji Hipotesis <i>T-test</i>	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner	74
Lampiran 2 Data Hasil Kuesioner	77
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	93
Lampiran 4 Hasil Deskripsi Subyek Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Usaha yang dilakukan oleh negara dalam mencapai kesejahteraan tersebut, tidak lepas dari perlunya melakukan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pertahanan dan keamanan. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional yang masih gencar dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia, terutama bagi negara-negara berkembang,

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, sejak dahulu memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi suatu negara yang harus mampu melebur dalam seluruh lapisan masyarakat. Daya beli konsumen yang cenderung tinggi menyebabkan tingkat konsumsi di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Deputi Gubernur Indonesia Dody Budi Waluyo menuturkan, konsumsi masyarakat yang tinggi akan mendorong kelanjutan pertumbuhan ekonomi (Kompas, 2019).

Daya Beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa (Tribudi, dkk., 2009). Daya beli menurut Putong (2003) adalah kemampuan seseorang dalam membeli banyaknya jumlah barang yang diminta di suatu pasar tertentu, dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu.

Dalam perekonomian tiga sektor yang terdiri dari rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan, terdapat aliran pendapatan dan pengeluaran baik atas pemerintah dan rumah tangga, maupun atas pemerintah dan perusahaan. Rumah tangga merupakan pengguna barang dan jasa atau konsumen sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. (Badan Pusat Statistik. “Konsumsi dan Pengeluaran.” 2019). Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, daya beli konsumen terhadap tingkat konsumsi dalam pengeluaran Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar 55,74 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Konsumsi rumah tangga menimbulkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Tahun 2018 pajak di Indonesia menyumbang lebih dari 80 persen terhadap pendapatan negara (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Keberadaan pajak menopang negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Penggunaan pajak dalam pembangunan nasional berupa pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Pembiayaan rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan hutang, dan lain-lain. Pembiayaan pembangunan mencakup pembangunan fisik yaitu jalan, jembatan, gedung, dan lain-lain, serta pembangunan non fisik yaitu pelatihan dan pembangunan spiritual lainnya (Parulian, 2017). Pajak yang muncul atas konsumsi rumah tangga yaitu pajak atas penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat juga jenis pajak lainnya yang muncul atas konsumsi barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Perpajakan. Seperti pada kendaraan bermotor terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pada kepemilikan atas pemanfaatan tanah dan bangunan terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU RI Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Keberadaan PPN memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan pajak dalam negeri yaitu sebesar 36,47 persen pada tahun 2018, 36,85 persen pada tahun 2017, dan 32,99 persen pada tahun 2016 (Kementerian Keuangan dalam Adharsyah, 2019) yang merupakan pendapatan pajak dalam negeri terbesar ke dua setelah pendapatan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan data tersebut, pendapatan PPN mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah meningkatnya penjualan atas kendaraan bermotor di Indonesia terutama di kota-kota besar dari tahun ke tahun. Selain digunakan sebagai transportasi umum, zaman ini, kendaraan bermotor untuk penggunaan pribadi juga semakin banyak diminati orang-orang.

BPS mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai kendaraan yang digerakkan oleh alat teknik pada kendaraan tersebut, yang biasa digunakan untuk mengangkut orang atau barang diatas jalan raya, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Dahulu, kendaraan bermotor merupakan kebutuh tersier bagi masyarakat, yaitu sebagai kebutuhan yang keberadaannya sekedar menjadi isyarat atas status orang yang memilikinya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kendaraan bermotor bergeser menjadi kebutuhan sekunder yaitu jenis kebutuhan yang bagi manusia berperan penting dalam menunjang aktivitas keseharian hidupnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa orang memiliki kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan atas eksistensi diri. Kendaraan bermotor kini menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi masyarakat karena menjadi sarana transportasi yang mendukung aktivitas masyarakat untuk lebih cepat berkembang. Kinerja masyarakat menjadi optimal dengan adanya kendaran bermotor yaitu ditandai dengan semakin cepatnya dan

efisien suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat. Bahkan dapat meringankan pekerjaan penggunanya karena untuk menempuh jarak yang terbilang jauh akan lebih mudah untuk dijangkau. Masyarakat kini semakin menggantungkan hidupnya terhadap eksistensi kendaraan bermotor.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam pencatatan datanya, kendaraan bermotor digolongkan atas mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan sepeda motor. Pada tahun 2015 tercatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 121.394.185 buah, tahun 2016 sebanyak 129.281.079 buah, dan tahun 2017 sebanyak 138.556.669 buah. Di kota Jakarta sendiri jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2014 tercatat sebanyak 17.523.967 buah, tahun 2015 sebanyak 18.668.056 buah, dan tahun 2016 sebanyak 18.006.404 buah (Ditlantas Polda Metro Jaya dalam Kundalini & Latif, 2018). Secara khusus jumlah kendaraan bermotor jenis mobil pada tahun 2014 tercatat sebanyak 4.301.736 buah, tahun 2015 sebanyak 4.538.665 buah, dan tahun 2016 sebanyak 4.554.216 buah, diikuti tahun 2017 sebanyak 4.859.750 buah, lalu tahun 2018 sebanyak 5.093.170 buah.

Selain pengenaan PPN oleh pemerintah, pajak lain yang melekat atas konsumsi kendaraan bermotor adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah menjelaskan bahwa PPnBM merupakan pajak atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean untuk kegiatan usaha maupun pekerjaannya, ataupun atas impor barang mewah. PPnBM adalah jenis pajak yang melekat erat dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Saat terjadi penyerahan atau konsumsi kendaraan bermotor, seseorang akan dikenakan PPN atas konsumsinya, juga sekaligus dikenakan PPnBM jika kendaraan bermotor tersebut tergolong sebagai barang mewah sebagaimana tercantum dalam peraturan perpajakan.

Secara khusus dalam kendaraan bermotor juga terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas dasar kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan, akan dikenakan PKB dengan tarif progresif yaitu tarif pajak yang akan semakin tinggi mengikuti banyaknya kepemilikan atas suatu objek pajak, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Tarif progresif akan berbeda-beda untuk setiap daerah provinsi, tergantung daerah provinsi tempat di mana kendaraan tersebut terdaftar. Tarif progresif dikenakan kepada kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu buah dengan nama dan/atau alamat yang sama, dan mulai diberlakukan pada tahun 2010 di DKI Jakarta. Pemungutan PKB dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I di Kantor Bersama Samsat. PKB cukup berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan bagi suatu daerah. Maulida (2018) menerangkan bahwa penerimaan pajak daerah sebesar Rp 24,96 triliun berhasil tercapai per 11 September 2018 menurut catatan data realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta. PKB yang masuk mencapai Rp 5,69 triliun, yaitu yang terbesar kedua setelah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 6,32 triliun. PKB per September 2018 berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sebesar 29,91 persen.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, terlihat bahwa konsumsi akan kendaraan bermotor tetap memiliki peminat yang tinggi di Indonesia terlebih di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan bermotor semakin tinggi setiap tahunnya, dan penerimaan pajak juga ikut meningkat seiring meningkatnya konsumsi kendaraan bermotor. Padahal, konsumen dalam memperoleh kendaraan bermotor tersebut tidak sedikit dalam menanggung setiap pajak yang timbul untuk memperoleh sebuah kendaraan apalagi dua atau lebih kendaraan.

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap PPN oleh Ratnasari dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa PPN mempunyai

pengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pramesti dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Dalam PPnBM, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mariska (2015) menyatakan bahwa PPnBM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen, sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahur (2016) menyimpulkan bahwa PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen. Atas PKB tarif progresif, peneliti sebelumnya Indirayuti (2019) menyimpulkan bahwa PKB tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen sedangkan menurut Pramesti dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa PKB tarif progresif berpengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor khususnya mobil-mobil yang termasuk golongan mewah dengan kepemilikan kendaraan sebanyak satu buah atau lebih. Penulis akan membahas penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT.”**

2. Identifikasi Masalah

Adanya perbedaan hasil penelitian yang timbul dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah, seperti (1) Bagaimana pengaruh PPN terhadap daya beli masyarakat dalam membeli mobil? (2) Bagaimana pengaruh PPnBM terhadap daya beli masyarakat dalam membeli mobil mewah? (3) Bagaimana pengaruh PKB tarif progresif terhadap daya beli masyarakat dalam membeli mobil? Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali variabel-variabel seperti PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor khususnya mobil.

3. Batasan Masalah

Pembahasan tentang hal-hal yang mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor akan sangat luas, karena banyaknya hal yang mempengaruhi hal tersebut. Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif karena variabel-variabel tersebut berhubungan erat dengan kendaraan bermotor khususnya mobil. Objek penelitian hanya terbatas pada pengguna kendaraan bermotor roda empat di wilayah Jakarta Barat.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Sebagai sarana dalam menyediakan informasi ataupun referensi terhadap peneliti-peneliti lainnya yang ingin mengembangkan atau mendalami kembali tentang masalah ini.
2. Sebagai sarana dalam menyediakan informasi bagi masyarakat umum dalam menambah pengetahuan akan dunia perpajakan dengan kendaraan bermotor roda empat.
3. Sebagai sarana dalam menyediakan informasi bagi pemerintah atau pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan atas pajak dengan kendaraan bermotor roda empat dalam mengambil keputusan.
4. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan penulis sekaligus sebagai salah satu pemenuhan syarat atas ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, T. (2019, 16 Agustus). *Mengejar Penerimaan Perpajakan Rp 1.819,2 T di 2020, Sanggup?*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816172700-4-92623/mengejar-penerimaan-perpajakan-rp-18192-t-di-2020-sanggup>.
- Ahmed, M., Zaman, F., & Samaduzzaman, M. (2015). VAT Increase and Impact on Consumers Consumption Habit. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 7(1), 105-115.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2019). *APBN 2018*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-apbn.asp>. Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Besaran PDB Menurut Komponen Pengeluaran (2018)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Konsumsi dan Pengeluaran*. <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html#subjekViewTab1> (diakses tanggal 20 September 2019).
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Pembentukan Modal Tetap Bruto*. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/site/search?search=Pembentukan+Modal+Tetap+Bruto+&yt0=Cari#> (diakses tanggal 20 September 2019).
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis 1949-2017*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> (diakses tanggal 20 September 2019).
- Ekanto, G. (2015). *PPnBM dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal*. <https://m.suara.com/bisnis/2015/07/08/125236/ppnbnm-dihapus-pemerintah-klaim-kurangi-beban-industri-lokal#!>. (diakses tanggal 30 September 2019).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamonangan, T., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hapsari, D. A. T. (2010). Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronik (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronik di Wilayah Tangerang Selatan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Indirayuti, A. (2019). Pengaruh PPN dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 13-22.
- Kundalini, D., Latif, A. (2018). *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2017*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 99-109.
- Mariska, F. (2015). Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronik di Wilayah Jalan ABC Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Kristen Maranatha.
- Maulida, R. (2018). *Pajak DKI: Ini Sumber Utama Pemasukan Jakarta*. <https://www.online-pajak.com/pajak-dki> (diakses tanggal 20 September 2019).
- Miftahur, R. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen. *Jurnal*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Nugraha, H. A. (2012). Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Oxford Dictionary of Economics*. (5th ed.). (2009). Oxford: Oxford University Press.
- Parulian, T. (2017). *Keseimbangan Pendapatan Nasional Perekonomian Tiga Sektor*. <https://docplayer.info/47139115-Keseimbangan-pendapatan-nasional-perekonomian-tiga-sektor.html>.
- Pawenang. S. (2016). *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. Disertasi*. Program Pascasarjana UNIBA, Surakarta.
- PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

- Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009.* (2009). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, & Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Pramesti, S. A. P. D., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 674-704.
- Putong, I. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ratnasari, I. A. P. & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Kendaraan Di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 887-914.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambur, N. C. P., Sondakh, J.J., & Sabijono, H. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Hasjrat Abadi Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 132-143.
- Sitinjak, T. J. R., & Sugiarto. (2006). *Lisrel*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemahamidjaja, S. (1964). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Statement of Standard Accounting Practice (SSAP) 5: Accounting for Value Added Tax*. (1993). United States: FASB.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sutra, E., Lili, S., & Cherya, D. W. (2015). Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang. *Jurnal*. STIE MDP Palembang.
- Tribudi, B., Adji, A., Kurniawati, Y. S., & Bukhari. A. S. (2009). *Katalog BPS Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Ulya, F. N. (2019, 29 Maret). *Konsumsi Masyarakat Tinggi Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. <https://money.kompas.com/read/2019/03/29/192403726/konsumsi-masyarakat-tinggi-dorong-pertumbuhan-ekonomi>.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.